BAB II
DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN DAN DEMOKRATISASI DI MYANMAR HINGGA KUDETA TAHUN 2021

Bab ini membahas mengenai dinamika sistem pemerintahan dan demokratisasi yang terjadi di Myanmar dimulai dari masa kepemimpinan Sao Shwe Taik hingga Kudeta Militer tahun 2021, dimana dalam bab ini mengeksplorasi upaya-upaya reformasi, demokratisasi, dan tantangan yang dihadapi pemerintah Myanmar di setiap masing-masing era kepemimpinan.

2.1 Dinamika Sistem Pemerintahan di Myanmar

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Myanmar sebagai sebuah negara di Asia Tenggara, termasuk negara yang paling terbelakang secara politik, sosial, dan ekonomi. Perjalanan masa lalu Myanmar yang beragam, telah berkontribusi terhadap fenomena politik yang terjadi di negara tersebut saat ini. Myanmar dulunya merupakan negara yang dihuni oleh banyak etnis, sebagian besar akibat invasi dan pendudukan Mongolia di Myanmar beberapa abad yang lalu, yang menjadi pintu masuk bagi beberapa kelompok etnis dari luar Myanmar untuk datang dan mendirikan negara.

Selain itu, Myanmar secara historis pernah diserang oleh sejumlah negara barat, termasuk Inggris dan Portugis. Sebelumnya dikenal sebagai *Union of Burma* dan menjadi koloni Inggris hingga memperoleh kemerdekaan pada tanggal 4 Januari 1948 dan memisahkan diri dari pemerintahan dan pendudukan Inggris, berkat *Burma Independence Act* yang dirancang oleh

Inggris dan Myanmar. Meskipun demikian, Myanmar berhasil mempertahankan perbatasannya dari gangguan Portugis. Namun pada akhirnya, harus menyerahkan kendali atas Myanmar kepada Inggris. Myanmar bukanlah negara Persemakmuran Inggris, meskipun pernah menjadi koloni Inggris. Sejak perang melawan Inggris menghasilkan kemerdekaan, telah terjadi banyak kerusuhan politik di negara bagian Myanmar setelah itu. Disamping itu, Jenderal Aung San, ayah dari Aung San Su Kyi, mempelopori perjuangan kemerdekaan Myanmar sebelum dibunuh oleh lawan politiknya karena dituduh mengkhianati kemerdekaan Myanmar melalui perjanjian dengan pemerintah kolonial Inggris. Sao Shwe Taik mengambil alih jabatan komandan gerakan pembebasan Myanmar setelah kematian Aung San, sementara Ne Win menjadi penanggung jawab kamp militer.

Sebelum militer mengambil kendali, demokrasi adalah jenis pemerintahan yang ada di Myanmar. Setiap orang di Myanmar memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pemikirannya melalui pembentukan partai politik dan partisipasi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah di bawah sistem demokrasi sebelumnya. Pemilihan umum pertama kali dilaksanakan sebagai bagian dari pemilihan dewan legislatif pada tanggal 21 November 1922 dan ada juga pemilihan singkat pada tahun 1925, 1928, 1932, dan 1936 setelah Inggris menduduki Myanmar. “Pemilihan umum pertama berdasarkan UUD ini dilaksanakan dalam waktu 18 bulan sejak tanggal berlakunya UUD ini,” bunyi Pasal 233 UUD 1947. Namun, antara

Januari 1951 dan Januari 1952, terdapat tiga pemilihan umum akibat perselisihan sipil yang menyertai kemerdekaan[31].

2.1.1 Kepemimpinan Era U Nu

Di bawah pemerintahan sipil U Nu, Myanmar memiliki kesempatan untuk menjalankan bentuk pemerintahan demokratis. Pada saat yang sama, negara ini menjalankan sistem parlementer[32]. Ketika U Nu menjadi perdana menteri pada tahun 1960 dan memenangkan pemilu, sejumlah besar pemberontak bangkit untuk melawannya. Saat isu ini diangkat di Myanmar, negara tersebut sedang menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial. Militer menanggapi tekanan publik yang kuat di Myanmar untuk membangun stabilitas politik, yang pada akhirnya memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah untuk memperbaiki ekonomi politik negara tersebut[33]. Penduduk Myanmar yang pro-militer dan militer Myanmar pada 2 Maret 1962 menggulingkan U Nu setelah U Nu diketahui gagal dalam pemerintahannya. Pemerintahan militer di Myanmar muncul setelah penggulingan kekuasaan U Nu[34].

Masyarakat Myanmar baru bisa menyaksikan sistem pemerintahan konstitusional demokratis di negaranya dalam kurun waktu 14 tahun

---

[31] Fernando Eugenio Rugian, dkk, *Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021)*. Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol, 7, No, 2 (Mei 2022), hal. 38

[32] Devi Apriyanti & Saiman Pakpahan, *Reformasi Politik Dan Ekonomi Di Myanmar Pada Masa Pemerintahan Presiden U Thein Shein (2011-2013).* Jurnal Transnational, Vol, 6, No, 1 (Juli 2014) : 1181.

[33] Sugiarto Pramono, *Efektivitas Embargo Dalam Mendorong Demokratsasi di Myanmar.* Forum Ilmu Sosial 41, No, 1 (Juni 2014): 137.

[34] Ibid.

yang singkat itu. Setelah 14 tahun hidup di bawah sistem ketatanegaraan negara tersebut, mimpi buruk bagi rakyat Myanmar kembali muncul, membawa serta pemerintahan otoriter yang keras kepala dan kemudian melanggar hak asasi manusia.

2.1.2 Kepemimpinan Era Ne Win

Pada tahun 1962, Jenderal Ne Win, seorang anggota angkatan udara yang memegang kekuasaan di Myanmar pada saat itu, memerintahkan Tatmadaw yang merupakan angkatan bersenjata Myanmar untuk melakukan kudeta yang mengarah pada kediktatoran militer. Dewan Revolusi Persatuan yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win berhasil menggantikan pemerintahan sipil *The Anti-Fascist People's Freedom League* (AFPFL) yang dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu[35]. Setelah itu, kudeta berhasil dilaksanakan, pemerintahan sipil yang dijalankan secara transparan dan demokratis pun hancur.

Setelah kudeta, pemerintahan militer pada dasarnya mengendalikan setiap aspek kehidupan Myanmar, termasuk bidang politik dan ekonomi. Junta militer mengambil kendali atas seluruh kegiatan ekonomi dimulai dengan menguasai aset-aset kolonial Inggris, termasuk bangunan, perkebunan, perusahaan pelayaran, dan perusahaan lainnya. Perusahaan asing dinasionalisasi oleh rezim junta. Selain itu,

[35] Benedikta Miranti, *Bukan Pertama Kali, Kudeta Militer Besar Pernah Terjadi di Myanmar pada 1962*, diakses dalam https://www.liputan6.com/global/read/4471882/bukan-pertama-kali-kudeta-militer-besar-pernah-terjadi-di-myanmar-pada-1962 (03/04/2023, 01.11 WIB)

pemerintahan junta militer bebas mempekerjakan pekerja dengan gaji serendah mungkin guna mencapai tujuan komersial organisasi tersebut.

Masyarakat sipil di Myanmar bentrok dengan pemerintah otoriter yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win, dengan melancarkan protes dan demonstrasi. Akibat dampak dari kegagalan kebijakan diktator, pada tahun 1988 rezim militer di Myanmar menghadapi protes luas dari gerakan yang dikenal dengan sebutan "Pemberontakan 8888" atau "8888 Uprising". Beberapa organisasi, termasuk masyarakat, biksu Buddha, dan pelajar, mengambil keputusan untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa non-kekerasan. Pemerintahan satu partai sosialis pada saat itu sedang ditantang oleh gerakan protes yang dipimpin mahasiswa. Namun tidak ada karisma dalam gerakan tersebut untuk menyatukan semua kekuatan perlawanan terhadap pemerintah. Para mahasiswa menaruh harapan kepada Suu Kyi untuk memimpin[36].

Suu Kyi memulai karir politiknya pada bulan Agustus 1988 dengan memberikan pidato di depan sekitar 500.000 orang di kuil emas Buddha Yangon yang terkenal, Pagoda Shwedagon. Suu Kyi meneruskan warisan ayahnya dalam pidatonya dengan semangat "Perjuangan kedua untuk kemerdekaan nasional". Setelah pidatonya, Suu Kyi menjadi tokoh politik paling disukai di negaranya. Selama protes, para pengunjuk rasa

[36] Danur Lambang Pristiandaru, 2021, [Cerita Dunia] 8888, *Demo Skala Besar di Myanmar Menentang Kekuasaan Miluter*, diakses dari https://internasional.kompas.com/read/2021/04/10/130000470/-cerita-dunia-8888-demo-skala-besar-di-myanmar-menentang-kekuasaan?page=all.

menyerukan penggulingan secepatnya kediktatoran militer yang telah menguasai Myanmar, dengan alasan bahwa hal tersebut tidak efektif dan hanya memperburuk kehidupan warga negara tersebut[37]. Namun semangat optimisme ini hanya berlangsung sebentar. Militer di Myanmar melancarkan pemberontakan publik dan merebut kekuasaan satu bulan setelah pidato Suu Kyi dengan menjanjikan pemilu baru dan sistem multipartai. Demonstrasi ini mengakibatkan kematian lebih dari 3.000 hingga 10.000 warga sipil[38].

Komunitas internasional menanggapi pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar dengan menerapkan sanksi ekonomi yang berat, antara lain termasuk embargo, dan dengan melakukan pembunuhan terencana terhadap pengunjuk rasa yang melakukan demonstrasi tanpa kekerasan. Hal ini menyebabkan pengunduran diri Jenderal Ne Win dari jabatannya.

Pada tahun 1990, Suu Kyi menerima Hadiah Nobel Perdamaian atas perjuangannya dalam menyuarakan kebebasan dari kekangan rezim militer, kedua putranya menerimanya atas namanya. Hadiah uang sebesar $1,3 juta yang diterimanya diberikan untuk inisiatif kesehatan dan pendidikan di Myanmar. Selain itu, penghargaan tersebut mengangkat Suu Kyi sebagai perwakilan demokrasi dan hak asasi manusia serta menarik

[37] Rodion Ebbighausen, *Who is Myanmar's Aung San Suu Kyi?*, diakses dalam https://www.dw.com/en/who-is-myanmars-aung-san-suu-kyi/a-56406128 (14/11/2023 20.18)
[38] Eli Meixler, *How a Failed Democracy Uprising Set the Stage for Myanmar's Future*, diakses dalam https://time.com/5360637/myanmar-8888-uprising-30-anniversary-democracy/ (03/04/2023, 01.24 WIB)

perhatian Myanmar dalam skala global. Dia berkomitmen pada ideologi non kekerasan milik Mahatma Gandhi saat berada dalam tahanan rumah dan menyerukan "Freedom from fears." Namun, dia dipenjara oleh pemerintah militer atas popularitasnya sebagai ikon tokoh HAM[39].

2.1.3 Kepemimpinan Era Saw Maung

State Law & Order Restoration Council (SLORC) didirikan oleh Jenderal Saw Maung, yang kemudian mengambil peran sebagai pemimpin. Myanmar menjadi lebih mirip kediktatoran militer dalam praktiknya di bawah rezim SLORC. Angkatan Darat berkembang dan tumbuh. Bahkan kekuatan militer Myanmar dikabarkan menduduki peringkat kedua di Asia Tenggara, dengan Vietnam sebagai peringkat pertama. Karena dominasinya, SLORC mampu menindas pemegang kekuasaan dengan kekuatan yang semakin besar. Selain modernisasi militer, terdapat inisiatif untuk menjadikan Myanmar lebih mudah diakses oleh dunia luar. Masalah ini disorot dalam inisiatif *Visit Myanmar Year 1996*[40].

Pemilu pertama diadakan SLORC pada 27 Mei 1990 dengan hasil *National League for Democracy* (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi menang. 392 dari 485 kursi yang diperebutkan dan 59,9% suara terbanyak jatuh ke tangan NLD. Sementara itu, *National Unity Party* (NUP) yang

---

[39] Rodion Ebbighausen, *Who is Myanmar's Aung San Suu Kyi?,* diakses dalam https://www.dw.com/en/who-is-myanmars-aung-san-suu-kyi/a-56406128 (14/11/2023 20.18)

[40] Mikael, Gravers, *Nationalism As Political Paranola In Burma, An Essay on the Historical Practice of Power,* New York: Nordic Institute of Asian Studies Madison Avenue, 1999 hal. 139, 270

memimpin pemerintahan hanya berhasil meraih 10 kursi dan 21,2% suara terbanyak. Namun militer tiba-tiba membatalkan pemilihan parlemen, memenjarakan Suu Kyi, dan menghentikannya. Pemerintahan SLORC kemudian memulihkan pemerintahan, mengabaikan hasil pemilu yang dilakukan. Setelah pemilu, pihak oposisi menjadi sasaran sejumlah bentuk penindasan yang lebih parah. Jenderal Than Shwe mengambil alih posisi setelah Saw Maung mengundurkan diri pada tahun 1993[41].

2.1.4 Kepemimpinan Era Than Shwe

Suatu langkah gerakan politik yang menuntut penyerahan kekuasaan secara instan dari militer ke otoritas sipil tidaklah selalu bijaksana dan berhasil. Kelompok oposisi *National League for Democracy* (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, yang menyerukan transisi rezim di Myanmar dengan Jenderal Than Shwe sebagai pimpinannya adalah salah satu contohnya. Junta militer berusaha menumpas gerakan oposisi NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yang menyerukan pergantian pemerintahan dari rezim Militer Myanmar pimpinan Jenderal Than Shwe.

Upaya untuk menghentikan segala gerakan yang dapat membahayakan keamanan status quo yang telah lama ada mengakibatkan pukulan fisik yang fatal. Popularitas NLD yang semakin naik sebagai gerakan yang memperjuangkan pemerintahan demokratis juga memperkuat kediktatoran militer di Myanmar dengan menggunakan Junta

[41] OkeNews, 2009, *Myanmar kecam ASEAN*, diakses dari https://news.okezone.com/read/2009/05/26/18/223042/myanmar-kecam-asean (14/11/2023, 20.21 WIB)

Militer untuk mengakhiri protes dengan kejahatan kekerasan yang menyebabkan kerugian atau bahkan kematian.

Setelah penangkapan Aung San Suu Kyi, junta mengambil kembali kendali pemerintahan. Hal ini mengakibatkan Myanmar terkena sanksi politik dan ekonomi dari dunia internasional, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa. Jenderal Than Shwe berupaya mempertahankan kendali militer terutama untuk memastikan keberlangsungan kekuatan pemerintahannya. Proses demokratisasi di Myanmar tidak serta merta berjalan mulus. Ternyata hal ini lumrah terjadi dalam proses transisi sistem politik suatu negara, ketika ada gerakan yang menuntut penyerahan kekuasaan segera dari rezim militer ke rezim sipil. Penyerahan ini selalu terhambat oleh kekuatan rezim militer yang bertekad mempertahankan status quo yang telah dibangun dengan susah payah[42].

State Peace and Development Council (SPDC) adalah nama baru pemerintahan SLORC pada tahun 1997. Selain itu, Myanmar bergabung dengan ASEAN, sebuah organisasi regional untuk Asia Tenggara, pada bulan Juli tahun yang sama. Beberapa analis menyatakan bahwa keanggotaan Myanmar di ASEAN merupakan upaya untuk mendapatkan legitimasi regional, yang didukung oleh pernyataan Dr. Mahathir Mohamad, perdana menteri Malaysia. Myanmar diundang ke konferensi perencanaan ASEAN yang pertama pada tahun 1967, namun Myanmar

[42] Muhamad Adian Firnas dan Kiky Rizky, 2023, *Krisis Politik Myanmar: Masa Depan Demokrasi Pasca Kudeta Militer*, Intermestic: Journal of International Studies, Volume 7, No. 2, Mei 2023.

menolaknya karena percaya bahwa ASEAN adalah organisasi imperialis. Aung San Suu Kyi masih menjalani tahanan rumah dan harus melaporkan semua kejadian kepada kediktatoran militer di Myanmar, sementara itu Junta Militer berhasil mempertahankan kendali atas urusan negara tersebut tanpa adanya pemberontakan besar.

Mirip dengan tahun 1988, terjadi demonstrasi putaran kedua di Myanmar pada tahun 2007. Biksu Buddha di Myanmar mempelopori demonstrasi putaran kedua. Awalnya, para biksu menolak sumbangan makanan dari keluarga dan jenderal terkemuka di Myanmar. Penolakan ini semakin mencerminkan keinginan para biksu untuk tidak lagi mendukung tindakan otoritas militer. Penghapusan subsidi menyebabkan lonjakan harga bahan bakar beberapa ratus persen, yang pada gilirannya memicu unjuk rasa. Kemudian, ratusan biksu mulai melakukan protes di beberapa kota di Myanmar, dan akhirnya, sejumlah besar warga ikut bergabung. Protes besar-besaran ini dipadamkan dengan kekerasan oleh pemerintah militer, yang mengunci pagoda, memenjarakan pengunjuk rasa, dan menggunakan senjata untuk membubarkan massa sehingga mengakibatkan banyak biksu yang disiksa dan tewas[43].

Ketika unjuk rasa pertama kali dimulai pada bulan Agustus 2007, semuanya berjalan dengan damai. Namun protes ini berubah menjadi bencana yang brutal. 20.000 biksu termasuk di antara 100.000 orang yang

[43] DW, 2007, *Protes Para Biksu di Myanmar*, diakses dari https://p.dw.com/p/CIqG (01/10/2023, 20.05 WIB)

menyaksikan rapat umum ini pada 26 September 2007 di Yangoon menjadi korban serangan militer yang menggunakan gas air mata, dan melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan para biksu dan warga. Sedikitnya 4 biksu terlibat dalam tragedi ini, 3 diantaranya adalah biksu yang meninggal dunia dan 100 orang diantaranya luka-luka[44].

Menanggapi tuduhan dari luar bahwa pemerintahan militer di Myanmar telah beberapa kali melanggar hak asasi manusia, rezim militer di negara tersebut memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum pada tahun 2011 yang dihadiri oleh sejumlah partai politik di Myanmar. Kemudian, pada tahun 2011, pemilu dilaksanakan, partai *Union Solidarity and Development* muncul sebagai pemenang dengan 70% suara. Thein Sein, sebagai calon dari partai tersebut, akhirnya dapat menggulingkan junta militer yang telah memerintah Myanmar sejak tahun 1962 dan menjadi presiden sipil di negara tersebut[45].

2.1.5 Kepemimpinan Era Thein Sein

Thein Sein dulunya pernah menjabat sebagai wakil kediktatoran militer Myanmar untuk ASEAN dengan pangkat jenderal. Thein Sein sebelumnya adalah anggota rezim itu. Namun, Sein mengundurkan diri dan jabatan serta pangkatnya dicabut setahun sebelum pemilu untuk bergabung dengan partai sipil, yang kemudian membawa kemenangan pada pemilu 2011. Salah satu contoh awal pertumbuhan demokrasi di

---

[44] Mudditt, Jassica, 2018, *Burma or Myanmar: Will the US make the switch?*, (01/10/2023, 20.08 WIB)

[45] Yumetri Abidin, 2020, *Pengantar Budaya Masyarakat Asia Tenggara*, UNAS PRESS, Universitas Nasional, Jakarta.

Myanmar adalah rezim Thein. Di bawah kepemimpinan Thein Sein, demokrasi Myanmar mengalami beberapa perkembangan signifikan, termasuk terbukanya negara terhadap dunia luar dan pembebasan tahanan politik seperti Aung San Suu Kyi. Pemilu ulang diadakan pada bulan Maret 2012, dan partai NLD menang dengan 40 dari 45 kursi yang diperebutkan. Thein Sein berhasil mencabut sanksi ekonomi yang dijatuhkan dunia internasional atas sejumlah kejahatan hak asasi manusia. Hal ini juga membuka sejumlah jalur bisnis yang sebelumnya tertutup[46].

Karena banyaknya perusahaan asing yang kembali ke Myanmar dan membuka kembali berbagai lapangan kerja di saat masyarakat Myanmar yang sudah hidup di garis kemiskinan selama lebih dari 50 tahun sangat membutuhkannya, pemerintahan Thein berdampak pada pertumbuhan angkatan kerja di Myanmar dan pengurangan pengangguran. Kritik internasional terhadap kepemimpinan Sein juga tidak luput dari kritik, terutama mengingat perlakuan sewenang-wenang pemerintah terhadap etnis minoritas di Myanmar, seperti Rohingya[47].

2.1.6 Kepemimpinan Era Htin Kyaw

Kemudian, ketika pemilu dilaksanakan kembali pada tahun 2015, hal tersebut terjadi sembilan puluh partai dan 6.000 kandidat bersaing dalam pemilu paling demokratis di Myanmar hingga saat ini. Partai Liga

---

[46] Khanisa Krisman, *Garis Awal Jalan Demokrasi Myanmar*, diakses dari http://www.politik.lipi.go.id/en/columns/politik-internasional/624-garis-awal-jalan-demokrasimyanmar.html (14/11/2023, 20.00 WIB)

[47] Kadek Putra Yasa, 2022, Analisis *Kudeta Militer Myanmar Terhadap Pemerintahan Sipil Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol, 2 No, 2, hal. 103-110.

Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi memenangkan pemilihan umum, namun Suu Kyi tidak diizinkan menjabat sebagai presiden Myanmar karena klausul dalam konstitusi negara tersebut yang melarang warganya yang memiliki anak dengan warga negara asing yang tinggal di Myanmar untuk menjabat sebagai presiden. Karena kala itu, Suu Kyi menikah dengan warga negara Inggris dan telah melahirkan dua orang anak yang keduanya merupakan warga negara Inggris[48].

Kemudian, Htin Kyaw sebagai salah satu pejabat penting partai NLD ditunjuk sebagai calon presiden untuk menggantikan San Suu Kyi, yang dilarang menjabat karena batasan hukum. Pada 10 Maret 2016, pemerintah Myanmar secara resmi menunjuk Kyaw sebagai presiden, menjadikannya pemimpin pertama negara tersebut yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan kediktatoran militer negara tersebut. Hal ini menandai awal transisi menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

Prestasinya menjadi lebih berarti karena Htin Kyaw adalah pilihan dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin oleh tokoh ikonik Aung San Suu Kyi. Terpilihnya Htin Kyaw sebagai presiden memperlihatkan dorongan masyarakat Myanmar untuk memulai babak baru yang lebih terbuka dan inklusif.

[48] BBC News Indonesia, 2018, *Di tengah kabar 'sakit-sakitan', Presiden Myanmar Htin Kyaw mengundurkan diri*, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43482066 (15/11/2023, 18.58 WIB)

Dalam perannya sebagai presiden, Htin Kyaw berusaha membawa perubahan positif. Meskipun konstitusi masih memberikan kekuasaan signifikan pada militer, Htin Kyaw bekerja sama dengan Aung San Suu Kyi dan pemerintahan sipil untuk memajukan reformasi dan mendukung agenda demokratisasi.

Namun, tantangan tetap ada. Konstitusi yang masih mencerminkan keberlanjutan pengaruh militer dan kompleksitas masalah etnis menjadi hal yang perlu dihadapi. Meskipun demikian, kepemimpinan Htin Kyaw menggambarkan komitmen untuk melepaskan Myanmar dari masa lalu yang didominasi oleh pemerintahan militer dan menuju masa depan yang lebih demokratis[49].

Pada Maret 2018, Htin Kyaw mengambil keputusan sulit untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden karena alasan kesehatan. Namun, perubahan pemimpin tidak menghentikan momentum reformasi. Win Myint, seorang politisi senior NLD, kemudian mengambil alih sebagai presiden dan melanjutkan perjalanan demokratisasi yang telah dimulai[50].

Periode kepemimpinan Htin Kyaw menjadi babak baru dalam sejarah politik Myanmar, menggambarkan semangat perubahan dan aspirasi untuk mengukir masa depan yang lebih demokratis dan inklusif

[49] Glori K. Wandrianto, 2016, *Htin Kyaw, Presiden yang Pernah Dipenjara karena Berkelahi dengan Tentara...*, diakses dari https://internasional.kompas.com/read/2016/03/15/20000051/Htin.Kyaw.Presiden.yang.Pernah.Dipenjara.karena.Berkelahi.dengan.Tentara.?page=all (15/11/2023, 19.00 WIB)

[50] BBC News Indonesia, 2018, *Di tengah kabar 'sakit-sakitan', Presiden Myanmar Htin Kyaw mengundurkan diri*, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43482066 (15/11/2023, 18.58 WIB)

bagi negara tersebut. Meskipun tantangan tetap ada, langkah-langkah awal tersebut membuka pintu untuk perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih terbuka, bebas, dan demokratis.

2.1.7 Kepemimpinan Era Win Myint

Pada Maret 2018, Win Myint mengambil alih kepemimpinan sebagai Presiden Myanmar, meneruskan perjalanan reformasi demokratis yang telah dimulai sebelumnya. Win Myint memiliki tugas besar untuk memajukan agenda reformasi, memperkuat lembaga-lembaga demokratis, dan menghadapi berbagai tantangan yang melibatkan hak asasi manusia, ekonomi, dan hubungan dengan militer[51].

Selama masa pemerintahannya, Win Myint berusaha menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah dinamika yang kompleks. Win Myint terlibat dalam upaya penyelesaian konflik etnis yang telah lama berkecamuk di beberapa wilayah Myanmar, sambil berusaha untuk meredakan ketegangan antara pemerintahan sipil dan militer.

Namun, tantangan terbesar mungkin datang dari krisis hak asasi manusia di Rakhine State, khususnya terhadap kelompok Rohingya. Komunitas internasional memperhatikan perkembangan ini, memaksa pemerintahan Win Myint untuk menanggapi dan mengatasi situasi tersebut.

---

[51] VOA, 2018, *Parlemen Myanmar Pilih Presiden Baru*, diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/parlemen-myanmar-pilih-presiden-baru/4320551.html (15/11/2023, 19.00 WIB)

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga menguji kepemimpinan Win Myint. Dengan fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan penanganan dampak ekonomi pandemi, pemerintahannya berusaha menjaga kesejahteraan rakyat Myanmar.

Pada November 2020, Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum yang menjadi ujian signifikan bagi sistem demokrasi. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan Win Myint, meraih kemenangan mayoritas suara, menegaskan dukungan publik terhadap pemerintahan sipil.

Namun, pada 1 Februari 2021, Myanmar dikejutkan oleh kudeta militer yang mengakhiri kepemimpinan Win Myint. Kudeta tersebut menimbulkan protes massal dan menyoroti tegangnya hubungan antara pemerintahan sipil dan militer[52].

Dengan demikian, era kepemimpinan Win Myint mencerminkan perjalanan kompleks Myanmar menuju demokrasi, dengan perjuangan dan pencapaian, tetapi juga dengan tantangan besar yang masih harus dihadapi. Kudeta militer yang mengakhiri masa pemerintahannya telah membawa perubahan dramatis dalam dinamika politik dan sosial di Myanmar, menandai satu babak baru yang penuh ketidakpastian bagi negara ini.

[52] Novi Christiastuti, 2021, *Presiden Myanmar Bak Jatuh Tertimpa Tangga: Dikudeta dan Dijerat 3 Dakwaan*, diakses dari https://news.detik.com/internasional/d-5479062/presiden-myanmar-bak-jatuh-tertimpa-tangga-dikudeta-dan-dijerat-3-dakwaan (15/11/2023, 21.01 WIB)

2.2 Kudeta Militer Myanmar Tahun 2021 di Myanmar

Myanmar memiliki lebih dari 1.100 kursi federasi yang dipegang oleh partai demokrasi pada 8 November 2021, atau akhir tahun 2020. Masyarakat terus terlibat bahkan di tengah lonjakan COVID-19. Lebih dari 70% dari 37 juta orang bekerja sama, memberinya kemampuan untuk memilih. Dibandingkan dengan partai lain, NLD memperoleh 396 kursi, menurut komisi pemilihan umum[53].

Komisi Pemilihan Umum Myanmar dituduh oleh militer gagal mengatasi anomali signifikan dalam pemilu November 2020 di negara itu. Setelah kudeta 1 Februari 2021, Tatmadaw meluncurkan kampanye pada minggu-minggu berikutnya untuk mengakhiri protes dan perbedaan pendapat. Akibatnya, beberapa komunitas dan organisasi protes di sekitar Myanmar membentuk milisi untuk mempertahankan diri dari kekejaman negara dan memulai perlawanan bersenjata. Sepuluh tahun setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil di Myanmar, mereka setuju untuk mengalihkan kendali kepada pemerintahan sipil. Militer mengklaim adanya kecurangan pemilu, yang berujung pada perebutan kekuasaan melalui kudeta. Karena negara ini berada dalam kendali militer selama hampir 50 tahun di bawah pemerintahan yang represif, kudeta ini menciptakan teror luar yang meluas. Militer

[53] Fernando Eugenio Rugian, dkk, *Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021)*. Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol, 7, No, 2 (Mei 2022), hal. 38

berpendapat bahwa konstitusi yang mengizinkan pengambilalihan kekuasaan pada saat darurat nasional untuk memvalidasi kudeta tersebut[54].

Komisi Pemilihan Umum menyatakan pada tanggal 17 November bahwa hasil pemilu akan diumumkan lebih cepat dibandingkan tahun 2015. Dalam pemilu kali ini, Partai *National League for Democracy* (NLD), yang kini berkuasa, memenangkan 920 (82%) dari 1.117 kursi yang diperebutkan. Untuk sementara, Partai *Union Solidarity and Development* (USDP) yang didukung militer memperoleh 71 (6%) kursi. Sementara itu, 122 kursi diraih oleh 17 partai politik etnis, dan empat kursi diraih oleh calon independen[55].

Pasca pemilu, U Than Htau, Ketua Partai USDP mengklaim terdapat anomali dalam proses pemungutan suara, antara lain pembentukan komisioner pemilu di desa dan kelurahan, pedoman seleksi, dan kurangnya waktu bagi partai untuk berkampanye. Pihak militer telah berulang kali menuduh hasil pemilu tersebut, dengan menyatakan tanpa memberikan bukti apa pun, bahwa terdapat lebih dari 10,5 juta kasus kemungkinan terjadinya kecurangan, termasuk pemungutan suara yang tidak hadir, dan telah menuntut agar komisi pemilihan umum mengungkapkan statistik akhir pemungutan suara secara terbuka.

Militer memenjarakan Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya karena tidak bertindak atas kecurangan pemilu yang terang-terangan, klaim mereka

---

[54] Alice Cuddy, *Myanmar coup: What is happening and why?*, diakses dalam https://www.bbc.com/news/world-asia-55902070 (03/04/2023, 01.26 WIB)
[55] OkeNews, 2009, *Myanmar kecam ASEAN*, diakses dari https://news.okezone.com/read/2009/05/26/18/223042/myanmar-kecam-asean (14/11/2023, 20.21 WIB)

dalam pidato yang disiarkan di televisi militer, dan menambahkan bahwa keadaan darurat selama satu tahun telah diberlakukan. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Panglima Min Aung Hlaing telah diberi wewenang lebih besar dan akan menyelidiki penyimpangan pemilu. Hasil pemilihan umum yang diadakan tahun lalu telah dibatalkan oleh pemerintahan militer. Aung San Suu Kyi, penasihat negara partai saat ini, menyatakan bahwa pemungutan suara tersebut "tidak bebas dan tidak adil" dan tidak dilakukan sesuai dengan hukum dan konstitusi pada saat itu. Upaya militer untuk menghancurkan Partai *National League for Democracy* (NLD), yang dituduh melakukan penipuan pemilu, dan alasan lain yang menyebabkan pembatalan resmi hasil pemilu tidak lebih dari itu[56].

Setelah melakukan penyelidikan terhadap daftar pemilih dan surat suara di 315 daerah di seluruh negeri selama sekitar enam bulan, Komisi Pemilihan Umum (UEC), yang mengawasi pemerintah, membuat pengumuman. Kajian tersebut diamanatkan oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing, komandan kudeta. Militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun dan mengatakan mereka telah memenjarakan Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya karena tidak bertindak melawan kecurangan pemilu yang tidak berdasar dalam pidatonya di televisi militer. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa kewenangan telah diberikan kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, yang akan menyelidiki penyimpangan pemilu.

[56] Imanuddin Imran, 2022, *Legitimasi Kudeta Oleh Militer Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*, Skripsi, Makassar : Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Rakyat Myanmar kemudian melakukan protes untuk menggulingkan kediktatoran, dan seperti yang selalu terjadi, militer mengambil kembali kendali negara tersebut. Sehingga muncullah gerakan pro demokrasi yang dilakukan masyarakat di Myanmar yang memiliki peran yang cukup besar dalam perjalanan terkait dengan proses demokratisasi yang sedang terjadi di Myanmar. Banyaknya dari gerakan politik maupun gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pro demokrasi di Myanmar terhadap rezim pemerintahan militer Myanmar yang otoriter menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat Myanmar ingin adanya demokrasi di negaranya.

Terdapat beberapa peristiwa yang terjadi dalam politik Myanmar yang diantaranya merupakan usaha yang dilakukan oleh gerakan pro demokrasi di Myanmar untuk mengupayakan terjadinya demokratisasi di Myanmar dan menjadikan negara Myanmar menjadi negara demokrasi. ASEAN dan pihak asing lainnya mulai menaruh perhatian. Tujuan Tatmadaw mengklaim bahwa kudeta tersebut dilakukan untuk membangun kembali sosialisme dan demokrasi, yang telah hilang dari pemerintahan sipil akibat pemilihan umum yang curang dan salah.

Terjadi peningkatan protes dari simpatisan militer yang menuduh adanya kecurangan pemilu segera setelah NLD memenangkan pemilu pada November 2020. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang mendapat dukungan dari militer, sering merencanakan protes ini. Antara pemilu pada 8 November 2021 dan kudeta pada 1 Februari 2021, ACLED mendokumentasikan setidaknya 45 kejadian protes tersebut. Minggu-minggu

menjelang kudeta terjadi peningkatan keganasan protes, dan pada hari-hari berikutnya, pengunjuk rasa anti-kudeta terlihat diintimidasi dan diserang oleh demonstran pro-militer. Ada desas-desus bahwa pengunjuk rasa dibayar 5.000 kyat ($3 USD) untuk mengambil bagian dalam demonstrasi pro-militer. Ini adalah strategi yang biasa dilakukan militer di masa lalu untuk menggalang dukungan bagi militer[57].

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai dinamika pemerintahan Myanmar maka dapat digambarkan melalui bagan berikut.

Bagan 2. 1 Dinamika Pemerintahan di Myanmar Hingga Kudeta Tahun 2021

Sumber : Diolah oleh peneliti

Dari bagan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah merdeka pada tahun 1948, Myanmar mengalami perjalanan pemerintahan yang kompleks. Awalnya, periode demokrasi berlangsung hingga kudeta militer pertama pada

[57] Myanmar Now, 2021, *Military supporters seen coming and going from USDP office in Yangon*, diakses dari https://myanmar-now.org/en/news/military-supporters-seen-coming-and-going-from-usdp-office-in-yangon/ (19/01/2024, 18.00 WIB)

tahun 1962 yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Selama hampir lima dekade berikutnya, negara ini diperintah oleh rezim militer otoriter dengan dampak isolasi internasional dan stagnasi ekonomi. Terutama pada tahun 1988 dimana terjadi kudeta yang dilakukan Saw Maung. Transisi menuju pemerintahan sipil dimulai pada tahun 2011, membuka pintu bagi kebangkitan partai demokratis, terutama dengan kemenangan *National League for Democracy* (NLD) dalam pemilu 2015. Pemilu November 2020 kembali dimenangkan oleh NLD, tetapi kudeta militer pada 1 Februari 2021 membatalkan hasilnya, memicu protes massal dan ketidakstabilan politik.

2.3 Kemunculan Civil Disobedience Movement dan Demokratisasi di Myanmar

Civil Disobedience Movement (CDM) adalah salah satu gerakan pro demokrasi perlawanan sipil yang bertahan dalam upaya melawan kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 terbentuk pada 3 Februari 2021 hanya dua hari setelah kudeta tahun 2021 dilakukan. Dimana gerakan ini dapat digambarkan sebagai pemogokan massal, dimana pegawai sektor publik dari dari jajaran terendah dalam pelayanan publik hingga tertinggi, yang terdiri dari personel di sektor perbankan, kesehatan, dan pendidikan, pekerja di industri perkeretaapian, minyak dan gas, teknik, profesi hukum, sistem peradilan,

pegawai negeri, dan badan keamanan menolak perintah apa pun dari junta serta kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan junta[58].

Tujuan dari mogok kerja ini adalah untuk memberikan pesan yang jelas kepada junta militer bahwa rakyat Myanmar tidak akan mentolerir kediktatoran militer dengan menyangkal legitimasi atau kapasitas mereka untuk memerintah. Meskipun ada penarikan tenaga kerja dari junta, CDM terus menawarkan kesehatan, pendidikan, dan layanan penting lainnya kepada masyarakat Myanmar di bawah naungan tim administrasi rakyat, *Ethnic Revolutionary Organizations* (ERO), atau *National Unity Government* (NUG). Selain itu, CDM terdiri dari kumpulan orang-orang yang beragam dan inklusif dari berbagai bidang dan lapisan masyarakat, seperti halnya serikat pekerja, organisasi layanan publik, sejumlah bintang musik dan film, serta kelompok minoritas dan LGBT+ dengan cepat bergabung untuk mendukung gerakan ini.

Komunitas medis dan dokter memimpin segmen pertama pemogokan nasional. Para profesional kesehatan di Rumah Sakit Umum Mandalay, termasuk dokter dan perawat, mengatakan pada tanggal 2 Februari 2021, bahwa mereka tidak akan bekerja di bawah pemerintahan militer[59]. CDM segera mendapatkan popularitas setelah tersebar melalui media sosial. Mereka berpartisipasi dalam kampanye di 50 kotapraja, dan sekitar 90% dari seluruh staf layanan kesehatan terdaftar pada bulan pertama CDM.

---

[58] The Irrawaddy, *The Long History of Myanmar's Civil Disobedience Movement*, diakses dalam https://www.irrawaddy.com/news/burma/long-history-myanmars-civil-disobedience-movement.html (01/10/2023, 20.40 WIB)

[59] Tommy Walker, *How Myanmar's Civil Disobedience Movement is Pushing Back Against the Coup*, diakses dalam https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_how-myanmars-civil-disobedience-movement-pushing-backagainst-coup/6202637.html (14/11/2023, 21.01 WIB)

Industri-industri lain segera menyusul, dengan sektor pendidikan menjadi sangat menonjol karena para pekerja di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan pasca-sekolah menengah melakukan pemogokan. Menurut NUG, terdapat 200.000 guru yang mogok dari total 450.000 guru[60]. Kecurangan pemilu adalah pembenaran militer atas upaya kudetanya. Namun, pembenaran ini sangat menyinggung para pendidik karena banyak dari mereka di seluruh negeri secara sukarela membantu proses pemungutan suara pada pemilu November 2020, bekerja tanpa kenal lelah selama wabah COVID-19 untuk menjamin pemungutan suara dilakukan dengan benar. Sejumlah institusi yang ditutup karena wabah COVID-19 menyatakan diri sebagai "Universitas CDM" dan mengabaikan perintah militer untuk membuka kembali. Akibatnya, diperkirakan 90% siswa sekolah dasar dan menengah menolak untuk mendaftar pada bulan Juni 2021[61].

Kementerian Agama, Perhubungan dan Komunikasi, Listrik dan Energi, Kesejahteraan Sosial, Penerangan, Kesehatan, Pendidikan, Perencanaan dan Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri termasuk di antara kementerian-kementerian yang pegawainya ikut serta dalam pemogokan tersebut[62]. Para pekerja di pelabuhan dan pelabuhan berhenti bekerja, dan pemogokan juga dilakukan oleh para penambang dan karyawan

---

[60] RFA Burmese, *Dozens of teachers killed, hundreds arrested by Myanmar junta for joining strike*, diakses dalam https://www.rfa.org/english/news/myanmar/teachers-killed-07222022161430.html (14/11/2023 21.13 WIB)

[61] Anonymous, *The Centrality of the Civil Disobedience Movement (CDM) in Myanmar's Post-Coup Era*, diakses dalam https://www.newmandala.org/the-centrality-of-the-civil-disobedience-movement-in-myanmars-post-coup-era/ (14/11/2023, 21.20 WIB)

[62] Wolfgang Dreschler, *New Development: Myanmar's Civil Service – Responsible disobedience during the 2021* diakses dalam https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540962.2021.1928948 (14/11/2023, 21.26 WIB)

pabrik peralatan militer yang dikelola junta di bawah Kementerian Pertahanan[63]. 90% dari 30.000 pegawai kereta api melakukan pemogokan seminggu setelah upaya kudeta. Lebih dari 400.000 pejabat pemerintah diperkirakan melakukan aksi mogok dalam hitungan minggu, yang secara efektif menghancurkan birokrasi negara[64].

Yang patut diperhatikan juga adalah personel polisi dan militer yang membelot. 2.000 tentara telah melakukan desersi, menurut laporan NUG pada bulan September 2021, dan kelompok-kelompok telah dibentuk untuk membantu dan mendorong individu yang melakukan tindakan ini[65]. *Thirteen People's Embrace*, sebuah kelompok yang didirikan oleh para pembelot, memperkirakan bahwa pada bulan Desember 2021, 6.000 personel polisi telah berkomunikasi dengan NUG atau organisasi oposisi. Sekitar 10.000 orang, termasuk 3.000 tentara dan 7.000 petugas polisi, telah melakukan desersi pada akhir tahun 2022. Personil polisi di Negara Bagian Karenni yang menolak bekerja untuk junta dan bergabung dengan CDM membentuk Kepolisian Negara Bagian Karenni yang beranggotakan 320 orang[66].

---

[63] Ko Maung and Stephen Campbell, *Dare to struggle, dare to win: Workers' resistance since the coup. Frontier Myanmar*, diakses dalam https://www.frontiermyanmar.net/en/dare-to-struggle-dare-to-win-workers-resistance-since-thecoup/ (14/11/2023, 21.33 WIB)

[64]Special Advisory Council for Myanmar, *Effective Control in Myanmar*, diakses dalam https:// specialadvisorycouncil.org/wp-content/uploads/2022/09/SAC-M-Briefing-Paper-Effective-Control-in-Myanmar-ENGLISH-1.pdf (14/11/2023, 22.09 WIB)

[65] National Unity Government of Myanmar, *Myanmar's Civil Disobedience Movement*, diakses dalam https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/2021-09-17-210916_CDM_Report_edited-signed.pdf (14/11/2023, 22.17 WIB)

[66] Myanmar Now, *Anti-junta police force formed in Karenni State by striking police officials*, diakses dalam https://myanmar-now.org/en/news/anti-junta-police-force-formed-in-karenni-state-by-striking-police-officials (14/11/2023, 21.24 WIB)

Para diplomat dan perwakilan Kementerian Luar Negeri lainnya telah mengambil bagian dalam CDM di seluruh dunia dengan berbagai cara. Dalam pernyataannya yang terkenal di Majelis Umum di New York, Kyaw Moe Tun, Wakil Tetap Myanmar untuk PBB, bergabung dengan CDM dan secara terbuka mengecam upaya kudeta tersebut, menyerukan tindakan internasional terhadap pelaku kudeta. Junta militer dipaksa untuk menarik kembali lebih dari 100 pegawai dari lokasi diplomatik di seluruh dunia pada Maret 2021 karena 17 diplomat dan anggota staf kedutaan bergabung dengan CDM[67].

Civil Disobedience Movement di Myanmar dapat dijustifikasi sebagai Gerakan Sosial Baru dengan merinci empat aspek yang mendefinisikan paradigma ini. Pertama, CDM memperlihatkan perubahan ideologi dengan menekankan kualitas hidup dan gaya hidup, menentang orientasi materialistik pemerintahan militer. Tujuan gerakan ini mencakup pendorong untuk otonomi dan identitas, sejalan dengan nilai-nilai Gerakan Sosial Baru. Kedua, CDM menggunakan taktik anti-institusi dengan tetap di luar saluran politik normal, mengadopsi strategi mengganggu dan mobilisasi opini publik yang sejalan dengan orientasi taktik Gerakan Sosial Baru yang menentang struktur kekuasaan konvensional. Selanjutnya, struktur organisasinya dinamis dan tidak permanen, menghindari kekakuan dan risiko oligarki, sesuai dengan sikap anti-institusi Gerakan Sosial Baru. Terakhir, partisipan CDM melibatkan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang kelas atau kelompok tertentu yang

[67] The Irrawaddy, *Myanmar Regime Recalls Over 100 Staff from Foreign Missions*, diakses dalam https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-regime-recalls-100-staff-foreign-missions.html (22.35 WIB)

mencerminkan karakteristik Gerakan Sosial Baru. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, *Civil Disobedience Movement* di Myanmar dengan kuat dapat dianggap sebagai Gerakan Sosial Baru yang mewujudkan perubahan dalam upaya-upaya perlawanan sipil terhadap otoritarianisme dan membangun visi perubahan sosial yang lebih luas.

Dalam konteks upaya *Civil Disobedience Movement* (CDM) di Myanmar, konsep demokratisasi yang diuraikan oleh Potter dapat dikaitkan dengan dinamika perubahan politik. Pendekatan ini memandang bahwa modernisasi sosial-ekonomi dapat meningkatkan prospek demokrasi. Dalam konteks CDM, terlihat adanya perubahan ideologi yang mencerminkan dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup dan gaya hidup, sekaligus menolak orientasi materialistik yang dipegang oleh pemerintahan militer sebelumnya. Modernisasi menekankan bahwa perubahan ideologi seperti ini dapat muncul sebagai bagian dari evolusi menuju demokrasi.

Selain itu, CDM mengadopsi taktik anti-institusi, mencerminkan penolakan terhadap struktur kekuasaan militer yang ada. Pendekatan modernisasi mengasumsikan bahwa perubahan struktural dan bentuk kekuasaan negara merupakan elemen kunci dalam demokratisasi. CDM, dengan tetap di luar saluran politik konvensional dan menerapkan strategi mengganggu, mencerminkan usaha untuk merubah struktur kekuasaan yang dianggap tidak demokratis.

Aspek lain dari modernisasi yang muncul dalam CDM adalah struktur organisasi yang dinamis. Modernisasi menyoroti pentingnya fleksibilitas dan

pluralitas untuk menghindari kekakuan dan risiko oligarki. CDM, dengan sifatnya yang inklusif dan dinamis, mencerminkan sikap anti-institusi dan keinginan untuk mencegah konsolidasi kekuasaan dalam satu kelompok atau entitas.

Partisipasi yang diversifikasi juga menjadi ciri khas CDM, sejalan dengan pandangan modernisasi bahwa perkembangan sosial-ekonomi dapat meningkatkan partisipasi dalam proses politik. CDM melibatkan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang kelas atau kelompok tertentu, menciptakan gambaran partisipasi yang lebih luas dan merata.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, CDM di Myanmar dapat dipandang sebagai bagian dari upaya masyarakat untuk mencapai modernisasi sosial-ekonomi. Gerakan ini bukan hanya sekadar pemogokan massal, melainkan juga ekspresi kuat dari keinginan untuk mengakhiri era otoriter dan membangun fondasi yang lebih demokratis untuk masa depan Myanmar.